LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)

SKPD
DINAS KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mengamanatkan bahwa setiap program dan kegiatan dari penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi adalah instansi yang berada di dalam jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah Kota Bukittinggi untuk menyampaikan laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati.

Pembangunan kesehatan diarahkan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi **“Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Untuk Menciptakan Masyarakat Kota Bukittinggi Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”**. Dimana untuk mencapai visi tersebut didukung oleh Misi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan terjangkau
2. Mewujudkan penurunan angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular
3. Mewujudkan tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan yang menyeluruh
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Kesehatan menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan upaya pengendalian angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular
3. Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat
4. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik

Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka yang menjadi sasaran yang dituju Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari tujuan Pertama “ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” adalah
 - 1) Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat

Diukur dengan indikator :

- a. Angka Harapan Hidup
- b. Angka Kematian Ibu
- c. Angka Kematian Bayi

- 2) Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan

Diukur dengan indikator :

- a. Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan
- b. Persentase Puskesmas yang terakreditasi

- 3) Meningkatnya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular Diukur dengan indikator :

- a. Insiden rate kejadian DBD
- b. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
- c. Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)
- d. Persentase kasus baru HIV

2. Sasaran dari tujuan Kedua “Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan” adalah Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diukur dengan indikator :

- 1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

Dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perlu ditindaklanjuti dengan strategi yang akan dilaksanakan, yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
2. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kelompok dan antar lembaga.
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.
6. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat di Kota Bukittinggi.

Secara lebih konkrit dalam RPJMD disebutkan bahwa untuk pencapaian misi tersebut dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan Ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas
- 2) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
- 3) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- 4) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
- 5) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas.

Pada awal tahun 2016, sudah disepakati Penetapan Indikator Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Walikota Bukittinggi yang merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum seluruh target Penetapan Indikator Kinerja sudah dapat dicapai dan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan sudah dapat dilaksanakan dengan baik.

B. DATA UMUM ORGANISASI

a. Tugas dan Wewenang Organisasi

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah kota Bukittinggi di dalam bidang pelayanan umum kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi

Struktur organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi eselon II,III dan Unit Pelaksana teknis serta Rincian Tugas Eselon IV dan Fungsional pada Dinas kesehatan Kota Bukittinggi dengan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- A. Kepala Dinas.
- B. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- C. Bidang-bidang, terdiri dari :
1. Bidang Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan & Penanggulangan Penyakit :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 2. Bidang Pelayanan Promosi & Sumberdaya Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Sumberdaya Kesehatan.
- D. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- E. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terhitung Desember 2018 adalah berjumlah 326 orang, tenaga PNS 311 dan 15 orang tenaga non PNS, yang tersebar pada kantor Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi serta 9 unit pelaksana teknis (7 UPTD Puskesmas, 1 UPTD Instalasi Farmasi, 1 UPTD Laboratorium).

**Tabel 1.1
Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Berdasarkan Golongan / Status Kepegawaian Tahun 2018**

No.	GOLONGAN (PNS / NON PNS)	Jumlah (Orang)
1	IV	12
2	III	239
3	II	25
4	I	1
5	Tugas belajar	3
6	Titipan	0
7	Cuti di luar tanggungan negara	1
8	Honor	2
9	Kontrak	13
J U M L A H		326

**Tabel 1.2
Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018**

No.	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS
A	<i>STRATA 2 (S.2)</i>		
	1 Magister Kesehatan	7	
	2 Magister Non Kesehatan	3	

No.	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS
<i>C</i>	<i>STRATA I (S.1)</i>		
1	Kedokteran Umum	14	
2	Kedokteran Gigi	11	
3	Keperawatan (Nurse)	6	
4	Keperawatan	10	
5	Farmasi (Apoteker)	7	
6	Kimia	1	
7	Biologi	3	
8	Tehnik Kimia	1	
9	Kesmas Gizi	3	
10	Kesmas Promkes	9	
11	Kesmas Adminkes	12	
12	Kesmas Keselamatan Tenaga Kerja	3	
13	Kesmas Epidemiologi	4	
14	Kesmas Statistik	1	
15	Kesmas Kesling	3	
16	Kesmas Bidan Komunitas	5	
17	Sosial	4	
18	Hukum	4	1
19	Ekonomi (Akuntansi)	2	
20	Pendidikan	1	
21	Pertanian	1	
22	Komputer	2	
<i>D</i>	<i>DIPLOMA IV (D.4)</i>		
1	Kebidanan	1	
<i>E</i>	<i>DIPLOMA III (D.3)</i>		
1	Kebidanan	36	30
2	Keperawatan	30	
3	Farmasi	12	
4	Kimia Analis	4	
5	Analisis Kesehatan	4	
6	Kesehatan Lingkungan	8	
7	Gizi	8	
8	Rekam Medik	7	
9	Kesehatan Gigi	8	
10	Tehnik Gigi	1	
<i>F</i>	<i>DIPLOMA I (D.1)</i>		
1	Kebidanan	10	
2	Kesehatan Lingkungan	1	
<i>G</i>	<i>SLTA</i>		
1	Keperawatan	13	
2	Farmasi	6	1
3	Perawat Gigi	2	
4	SLTA Non Kesehatan	6	11
<i>H</i>	<i>SLTP</i>	1	2
<i>I</i>	<i>SD</i>	1	2
<i>J</i>	TUGAS BELAJAR		
	1 Kedokteran Umum (S.1)	3	
<i>K</i>	Cuti di luar tanggungan negara	1	
J U M L A H		326	

Jenjang pendidikan tenaga PNS pada Dinas Kesehatan sebagian besar adalah jenjang D3 dan S1, dan masih terdapat tenaga bidan yang berpendidikan D1 yang harus ditingkatkan kualifikasinya minimal D3 hingga memenuhi syarat untuk sertifikasi bidan.

Sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini relatif bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dari seluruh profesi kesehatan yang harus ada, baik medis, paramedis maupun tenaga administrasi. Namun dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional, tenaga dokter umum masih dalam jumlah yang terbatas. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, apalagi dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengakibatkan peningkatan jumlah masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas.

2. Sarana dan Prasarana

Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya Puskesmas, institusi pendidikan tenaga kesehatan, Rumah Sakit dan Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat. Sarana kesehatan yang dimiliki Pemda Kota Bukittinggi adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Sebaran sarana kesehatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018

Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelolaan					Jumlah
	Pem. Pusat	Pem. Propinsi	Pem. Kota	TNI	Swasta	
Rumah Sakit Umum	0	1	0	1	2	4
Rumah Sakit Jiwa	0	0	0	0	0	0
RS. Bersalin	0	0	0	0	0	0
RS. Khusus	1	0	0	0	1	2
Puskesmas	0	0	7	0	0	7
Pusk. Pembantu	0	0	14	0	0	14
Pusk. Keliling	0	0	7	0	0	7
Posyandu	0	0	0	0	133	133
Poskeskel	0	0	0	0	26	26
Rumah Bersalin	0	0	0	0	4	4
Balai Pengobatan/Klinik	0	0	0	0	13	13
Apotek	2	1	0	1	54	54

Tabel 1.4
Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018

Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelolaan					Jumlah
	Pem. Pusat	Pem. Propinsi	Pem. Kota	TNI	Swasta	
Toko Obat	0	0	0	0	6	6

Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelolaan					
	Pem. Pusat	Pem. Propinsi	Pem. Kota	TNI	Swasta	Jumlah
IFK	0	0	1	0	0	1
Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0
Praktek Dokter Bersama	0	0	0	0	0	0
Praktek Dokter Perorangan	0	0	0	0	115	115
Jumlah	3	2	29	2	354	386

Sarana pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi, jumlahnya sudah sangat memadai. Puskesmas induk sudah ada pada setiap Kecamatan, Puskesmas Pembantu pada beberapa wilayah kelurahan, Poskeskel ada pada setiap Kelurahan. Apalagi untuk pelayanan kesehatan rujukan sudah ada beberapa buah rumah sakit baik RS Pemerintah maupun swasta. Akan tetapi Kota Bukittinggi belum mempunyai Rumah Sakit Milik Daerah sehingga pada tahun 2018 dilakukan persiapan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi.

Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Puskesmas seluruhnya sudah dapat disediakan oleh dana APBD, dana DAK Tahun 2018 dan dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan. Baik berupa obat, alat kesehatan, bahan kimia, mobil Puskel, Kendaraan roda dua untuk operasional pelayanan di masyarakat.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Dinas Kesehatan serta gambaran permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018 meliputi ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2018.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk perjanjian kinerja tahunan. Perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan daerah kepada Pimpinan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang dibuat merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada bulan Februari 2018 terdapat 2 sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Dari 2 sasaran strategis tersebut ditetapkan masing-masing indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat , dengan indicator :
 - a. Jumlah kasus kematian ibu melahirkan
 - b. Jumlah kasus kematian bayi baru lahir
 - c. Prevalensi gizi kurang BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)
 - d. Persentase keluarga sehat
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, dengan indikator :
 - a. Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
 - b. Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

Selanjutnya ditetapkan kinerja dengan 4 program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut. Beberapa program yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator:
 - a. Persentase penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
 - b. Persentase kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
 - c. Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun
 - d. Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker service
 - e. Persentase kelurahan yang telah ODF (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
2. Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, dengan indikator:
 - a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

- b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik
- 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, dengan indikator :
 - a. Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar
 - b. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes
- 4. Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan indikator :
 - a. Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar
 - b. Persentase pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sesuai standar tipe C
 - c. Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar

Program-program diatas, diuraikan lagi dalam 17 kegiatan yaitu:

- 1. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,dengan indikator :
 - 1. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons
 - 2. Incidence Rate DBD < 49 per 100.000 penduduk
 - 3. Persentase keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)
 - 4. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan HIV
 - 5. Persentase penanganan kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)
 - 6. Jumlah puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS
 - 7. Penurunan angka mikro filaria
- 2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular,dengan indikator :
 - 1. Jumlah puskesmas yang melaksanakanpengendalian PTM terpadu
 - 2. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
 - 3. Jumlah kelurahan yangmelaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
 - 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks
- 3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi, indikatornya :
 - 1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
 - 2. Cakupan program imunisasi pada kelompok sasaran
- 4. Meningkatnya Upaya Penyehatan Llingkungan, dengan indikator :
 - a. Jumlah puskesmas yang melakukan upaya penyehatan lingkungan
 - b. Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
- 5. Meningkatnya UpayaPengawasan Kualitas Lingkungan, dengan indikator :
 - a. Jumlah puskesmas yang melakukan pengawasan kualitas lingkungan
 - b. Persentase sarana air minum yang dilakukanpengawasan

- c. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
 - d. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
 - e. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
6. Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Air di Laboratorium Kesehatan, dengan indikator :
 - a. Jumlah pemeriksaan kualitas air di laboratorium kesehatan
 - b. Persentase pemenuhan alat kesehatan di laboratorium kesehatan
 - c. Jumlah peralatan laboratorium kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar
 7. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Reproduksi, dengan indikator :
 - a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
 - b. Jumlah puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
 - c. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali
 8. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja, dengan indikator :
 - a. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
 - b. Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I
 - c. Persentase pelayanan kesehatan anak sesuai standar
 - d. Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X
 - e. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja,
 9. Meningkatnya Pelayanan Gizi Masyarakat, dengan indikator :
 - a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan
 - b. Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
 - c. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
 - d. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
 - e. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
 - f. Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
 10. Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di Fasyankes, dengan indikator :
 - a. Jumlah puskesmas yang diakreditasi dan meningkat status akreditasinya
 - b. Jumlah Laboratorium Kesehatan yang diakreditasi
 11. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Essensial dan Pengembangan di Puskesmas, dengan indikator :
 - a. Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan

12. Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan, dengan indikator :
 - a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
 - b. Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas
 - c. Persentase apotek yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar
 - d. Jumlah sarana kefarmasian yang diberikan rekomendasi izin operasional
13. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan, dengan indikator :
 - a. Jumlah industri rumah tangga pangan yang memiliki SPP-IRT
 - b. Persentase sampel pangan yang memenuhi syarat
14. Pembangunan dan Rehabilitasi Fisik Puskesmas dan Jaringan, dengan indikator :
 - a. Jumlah gedung puskesmas dan jaringannya yang dibangun
 - b. Jumlah gedung puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi
15. Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi, dengan indikator :
 - a. Jumlah dokumen pembangunan RSUD yang disediakan
 - b. Persentase pelaksanaan pembangunan RSUD sesuai standar tipe C
16. Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan
 - a. Persentase pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan minimal
 - b. Persentase pemenuhan alat kesehatan di fasyankes
 - c. Jumlah alat kesehatan di puskesmas yang dikalibrasi sesuai standar
17. Jumlah alat kesehatan di puskesmas yang dikalibrasi sesuai standar
 - a. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/fungsional
 - b. Jumlah tenaga kesehatan teladan puskesmas
 - c. Jumlah tenaga kesehatan fungsional yang mengikuti uji kompetensi
 - d. Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktek
18. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - a. Persentase ketersediaan data kesehatan secara terintegrasi

Perjanjian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	72.56

NO	TUJUAN	SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET
			Angka kematian bayi (1000 kelahiran hidup)	20
			Angka kematian ibu (100.000 kelahiran hidup)	3
II	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	4. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	100
			Persentase Puskesmas yang terakreditasi	71,4
III	Meningkatkan upaya pengendalian angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	3. Meningkatnya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Insiden rate kejadian DBD (Persen)	95
			Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Persen)	92,5
			Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) (Persen)	81
			Persentase kasus baru HIV (Persen)	< 1
			Persentase Puskesmas yang terakreditasi	71,4
IV	Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan.	cc

Perjanjian kinerja berdasarkan anggaran program urusan kesehatan adalah sebagai tabel berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.586.394.825
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.686.000
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	299.000.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83.572.472
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.866.675
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.998.700
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.877.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.870.000
	10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	199.000.000
	11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	428.917.252
	12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	71.984.916
	13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	75.121.210
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.847.280.000
	1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000
	2	Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	192.280.000
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	200.000.000
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	5.000.000
	6	Pembangunan Hall Puskesmas Guguak Panjang	450.000.000
	7	Pengadaan Ambulance	980.000.000
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		42.091.500
	1	Penyusunan Profil Kesehatan dan Aplikasi SIK	29.091.500
	2	Pelayanan Administrasi kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	13.000.000
IV	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		1.079.717.215,-
	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	200.000.000
	2	Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	81.979.215
	3	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018)	749.000.000
	4	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018)	48.738.000
V	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		9,735,468,527
	1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasumah Ahmad	190.852.567,00
	2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	202.605.565,00
	3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	187.496.940,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
	4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	102.660.500,00
	5	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah	106.151.560,00
	6	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	169.389.210,00
	7	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	138.187.336,00
	8	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dasar dan Rujukan	253.814.700,00
	9	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana non Kapitasi)	45.000.000,00
	10	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	833.444.965,00
	11	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	1.051.736.338,00
	12	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	821.893.812,00
	13	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	876.567.349,00
	14	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	329.075.000,00
	15	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	227.310.527,00
	16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD (Dana Kapitalisasi JKN 2017)	346.623.023,00
	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	28.707.640,00
	18	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji	18.931.840,00
	19	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisik BOK 2018)	809.230.000,00
	20	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik BOK 2018)	328.956.000,00
	21	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik BOK 2018)	472.363.000,00
	22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gulai Bancah (DAK Non Fisik BOK 2018)	391.000.000,00
	23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik BOK 2018)	368.000.000,00
	24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik BOK 2018)	605.704.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
	25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Guguak Panjang (DAK Non Fisik BOK 2018)	832.214.000,00
	26	Manajemen Pengelolaan BOK (DAK Non Fisik BOK 2018)	166.000.000,00
	27	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik BOK 2018)	1.232.867.000,00
	28	Upaya kesehatan Masyarakat Tingkat Kota (DAK Non Fisik BOK 2018)	673.761.000,00
VI	Program Pengawasan Obat dan Makanan		204.812.570
	1	Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan dan Distribusi Sediaan Farmasi / Bahan Berbahaya di Sarana Kefarmasian	202.605.565
	2	Pengawasan Sanitasi Depot Air Minum	187.496.940
	3	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum	102.660.500
	4	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	106.151.560
VII	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		572.222.900
	1	Pengembangan Program Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	29.078.400
	2	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	8.167.200
	3	Pembinaan dan Monitoring Pokjanel Posyandu dan DBD	8.166.600
	4	Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	0,00
	5	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada	91.007.000
	6	Pembinaan PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat	12.336.000
	7	Fasilitas Kota Sehat	308.080.200
	8	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	115.387.500
VIII	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		255.596.745
	1	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	111.514.500
	2	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	114.005.725
	3	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja	30.076.520
IX	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		159.880.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
	1	Pengkajian Lingkungan Sehat	159.880.000
X	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		1.142.678.245
	1	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	96.064.750
	2	Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	42.247.550
	3	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	26.622.740
	4	Peningkatan Imunisasi	317.182.300
	5	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS	278.309.105
	6	Pengembangan IPWL	17.938.800
	7	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Fisik 2018)	137.000.000
	8	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBHCT) Tahun 2018	227.313.000
XI	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		553.713.800
	1	Persiapan Akreditasi Puskesmas	68.450.000
	2	Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan	0,00
	3	Akreditasi Laboratorium Air	21.263.800
		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018)	464.000.000
XII	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		2,038,890,600
	1	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk Miskin	2.013.696.000
	2	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan JKN	25.194.600
XIII	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		5.137.000.000
	1	Rehab Gedung Puskesmas, Pustu, Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	3.332.000.000
	2	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	1.805.000.000
	3	DED Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh	0,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
XIV	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata		40.479.081.783
	1	Pengelolaan Tim Pembangunan RSUD Bukittinggi	0,00
	2	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	40.479.081.783
XV	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		13.700.000
	1	Manajemen Pengelolaan BLUD	13.700.000
XVI	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		26.518.600
	1	Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia	26.518.600
XVII	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		27.731.000
	1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan	27.731.000
XVIII	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		126.949.910
	1	Peningkatan kesehatan ibu	68.074.720
	2	Peningkatan kesehatan anak	58.875.190
XIX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		104.516.600
	1	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	84.516.600
	2	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	20.000.000
		TOTAL	68.795.714.990

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

A. Tujuan

Terwujudnya Kota Bukittinggi Sebagai Kota Sehat, yang diukur dengan indikator Persentase Capaian Tananan Kota Sehat. Capaian indikator tujuan pada tahun 2018 adalah sebesar 57%. Artinya dari 7 tatanan kota sehat pada tahun 2018 telah mencapai 4 tatanan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Keberhasilan dalam peningkatan pencapaian tatanan kota sehat tidak lain karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi mendorong keterlibatan berbagai sector terkait termasuk stakeholder dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dengan pembentukan Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi, kelompok kerja kota sehat kecamatan dan kelurahan.

Analisis penggunaan sumberdaya

Masyarakat kota merupakan sumberdaya utama dalam mewujudkan kelurahan, kecamatan dan kota sehat. Masyarakat mendapatkan pembinaan dari sector terkait melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dicanangkan Walikota Bukittinggi. Unsur pembina meliputi sumberdaya dari bapelitbang, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata, dinas pendidikan, dinas pertanian serta lintas sector terkait lainnya termasuk puskesmas. Sedangkan unsur dari Forum Kota Sehat merupakan fasilitator dan penggerak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan berwawasan kesehatan. Sumberdaya dalam pembiayaan didukung melalui sumberdana APBD Kota Bukittinggi serta masyarakat.

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator

Indikator tujuan dalam pencapaian tatanan kota sehat berada dalam program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan Fasilitasi Kota Sehat. Program terkait lainnya adalah pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan pengkajian lingkungan sehat serta kegiatan-kegiatan yang berada dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, program perbaikan gizi dan program kesehatan ibu dan anak.

Sasaran 1 : Meningkatnya status kesehatan masyarakat

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN				CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
Meningkatkan status kesehatan	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Jumlah kematian ibu	5 kss	3 kss	Tercapai
		Jumlah kematian bayi	10 kss	4 kss	Tercapai
		Prevalensi gizi kurang BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)	4,75 %	4,1%	Tercapai
		Persentase keluarga sehat	10%	14%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, jika dilakukan analisa capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 3.2 Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator sasaran
1	100%	Sangat baik	3
2	85 % s/d <100%	Baik	0
3	70 % s/d < 85%	Sedang	0
4.	0 s/d < 70%	Kurang baik	0
	Jumlah		3

f. Pencapaian indikator penurunan jumlah kematian ibu

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Keberhasilan dalam penurunan kasus kematian ibu disebabkan dengan akses terhadap sarana pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin yang relatif dekat. Keberadaan rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, praktek bidan, poskeskel serta posyandu yang dapat dijangkau memudahkan ibu hamil dan ibu berhasil mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Analisis penggunaan sumberdaya

Sumberdaya kesehatan merupakan pilar dalam menjamin pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan yaitu bidan poskeskel, bidan puskesmas, dokter umum, dokter spesialis kandungan baik di fasyankes pemerintah maupun swasta. Melalui pelatihan-pelatihan, workshop, rapat koordinasi pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan parasana dan pemanfaatan anggaran maka ibu hamil maupun ibu bersalin berisiko dapat dipantau, dilayani dan dirujuk sesuai protapnya.

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator

Program pendukung meliputi program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, program peningkatan sumber daya kesehatan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya kesehatan, program standarisasi kesehatan dengan kegiatan peningkatan akreditasi puskesmas serta program promosi dan pemberdayaan masyarakat.

g. Pencapaian indikator jumlah kematian bayi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Keberhasilan dalam penurunan kasus kematian bayi disebabkan dengan akses terhadap sarana pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan anak yang relatif dekat. Keberadaan rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, praktek bidan, poskeskel serta posyandu yang dapat dijangkau memudahkan ibu bersalin dan bayinya mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Analisis penggunaan sumberdaya

Sumberdaya kesehatan merupakan pilar dalam menjamin pelayanan kesehatan ibu melahirkan, bayi dan anak yaitu bidan poskeskel, bidan puskesmas, dokter umum, dokter spesialis anak baik di fasyankes pemerintah maupun swasta. Melalui pelatihan-pelatihan, workshop, rapat koordinasi pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan parasana dan pemanfaatan anggaran maka ibu bersalin, bayi berisiko dan anak dapat dipantau, dilayani dan dirujuk sesuai protapnya.

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator

Program pendukung meliputi program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan pelayanan kesehatan anak, program peningkatan sumber daya kesehatan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya kesehatan, program standarisasi kesehatan dengan kegiatan peningkatan akreditasi puskesmas serta program promosi dan pemberdayaan masyarakat.

h. Prevalensi gizi kurang BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Keberhasilan dalam penurunan prevalensi gizi kurang balita dipengaruhi dengan adanya pemantauan status gizi balita secara rutin setiap bulan baik di posyandu, puskesmas serta fasyankes lainnya. Disamping itu setiap tahun juga dilaksanakan penimbangan massal sehingga ditemukan balita yang mengalami gizi kurang maupun gizi buruk. Upaya pemantauan juga dilakukan oleh masyarakat/kader dan bidan poskeskel secara rutin dan apabila ditemukan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan dan pembinaan dari tenaga gizi puskesmas.

Analisis penggunaan sumberdaya

Sumberdaya yang berperan dalam pemantauan status gizi kurang pada balita terdiri dari kader posyandu, bidan poskeskel, RT/RW, PKK tenaga gizi puskesmas serta tenaga kesehatan

dilapangan. Sarana yang digunakan dalam pemantauan balita gizi kurang ini adalah dacin dan timbangan. Sedangkan pembiayaan yang dibutuhkan besumber dari APBD Kota Bukittinggi.

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator

Program pendukung meliputi program peningkatan perbaikan gizi dengan kegiatan Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan kekurangan zat mikro lainnya, Pemberian makanan tambahan dan vitamin dan Monitoring dan evaluasi, KIE, integrasi program gizi baik yang ada di Dinas Kesehatan maupun di puskesmas.

i. Persentase keluarga sehat

Anaisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Keluarga sehat adalah suatu kondisi atau keadaan yang sejahtera baik dari segi fisik,mental, dan sosial yang kemudian memungkinkan sebuah keluarga yang utuh (terdiri dari individu-individu yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang tinggal dalam satu lingkungan Suatu kondisi atau keadaan yang sejahtera baik dari segi fisik,mental, dan sosial yang kemudian memungkinkan sebuah keluarga yang utuh (terdiri dari individu-individu yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang tinggal dalam satu lingkungan. Terdapat 12 indikator dikatakan satu keluarga sehat yang dilaksanakan dengan pendataan, pembinaan dan pemantauan melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PISPK). Pendataan keluarga sehat dengan PISPK dilaksanakan terhadap keluarga di seluruh kelurahan. Sehingga disamping diperoleh data keluarga dengan kategori sehat dan keluarga belum sehat juga mereka mendapatkan pembinaan dari petugas dengan tema promosi gerakan masyarakat hiudp sehat (Germas).

Analisis penggunaan sumberdaya

Sumberdaya yang berperan dalam pemantauan kelaurag sehat adalah kader posyandu, bidan poskeskel, RT/RW, PKK tenaga kesehatan di puskesmas. Sarana yang digunakan adalah instrument keluarga sehat. Sedangkan pembiayaan yang dibutuhkan besumber dari APBD Kota Bukittinggi dan BOK puskesmas dan BOK Tingkat Kota.

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator

Program pendukung meliputi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pemantauan keluarga sehat. Baik yang ada di Dinas Kesehatan maupun di puskesmas.

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Tabel 3.3
Capaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN				CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
Meningkatnya pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik di dalam gedung maupun diluar gedung	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80	90	Tercapai
		Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayananan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	70	75	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, jika dilakukan analisa capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 3.4 Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator sasaran
1	100%	Sangat baik	2
2	85 % s/d <100%	Baik	0
3	70 % s/d < 85%	Sedang	0
4.	0 s/d < 70%	Kurang baik	0
	Jumlah		2

a. Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

Anaisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi menunjukkan sudah baik, dimana jumlah penduduk/masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sudah mencapai sebahagian besar masyarakat kota. Dilain pihak sudah terakreditasinya 7 puskesmas dari 7

puskesmas di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah memenuhi standar akreditasi.

Analisis penggunaan sumberdaya

Sumberdaya menjadi faktor penentu pencapaian mutu layanan kesehatan masyarakat difasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya manusia yang berperan diantaranya adalah tenaga medis dan paramedis serta tenaga kesehatan terutama yang berada di puskesmas, pusku dan poskeskel. Ketersediaan anggaran yang cukup memadai dari APBD Kota Bukittinggi turut mendorong meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator

Program dan kegiatan penunjang diantaranya adalah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan akreditasi puskesmas, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk Miskin, Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta Program Obat dan Pembekalan Kesehatan dengan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

b. Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayananan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

Anaisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Peningkatan sarana prasana fasilitas pelayanan sudah mengalami peningkatan dimana adanya perbaikan gedung puskesmas, pengadaan peralatan kesehatan maupun non kesehatan serta dimulainya pembangunan rumah sakit daerah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan performa fisik sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standard akreditasi puskesmas.

Analisis penggunaan sumberdaya

Sumberdaya pendukung tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas. Disisi lain ketersediaan anggaran yang cukup memadai dari APBD Kota Bukittinggi turut mendorong meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan..

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator

Program dan kegiatan penunjang diantaranya adalah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dengan kegiatan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan kegiatan pengadaan alat kesehatan serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Disamping memiliki sasaran strategis dibidang kesehatan, Dinas esehatan juga memprioritasnya meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan dengan indicator adalah nilai Sakip yang semakin membaik.

Tabel 3.7
Capaian Kualitas Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN				CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	BB	BB	Tercapai

Hasil analisa diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan sudah berjalan baik. Upaya peningkatan kualitas manajemen dan birokrasi di Dinas Kesehatan terus menerus ditingkatkan dengan melaksanakan perbaikan manajemen perencanaan, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana. Sehingga ketersediaan anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dijelaskan diatas dapat meningkatkan capaian sasaran untuk meningkatnya kualitas pengelolaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah Rp.84.098.056.249,- dengan realisasi belanja Rp. **43.868,496,172,-** (71,57%). Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 96,67 % dan Belanja Langsung terealisasi sebesar 65,27 %. Urusan wajib kesehatan terdiri dari dari 18 program dengan 97 kegiatan.

Rincian Realisasi anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan 2018
Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2017			SISA ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		
			RP.	%			RP.	%	
	TOTAL BELANJA	79,821,823,607	40,057,776,914	50,18	6,499,579,153	84,098,056,249	43,868,496,172	71,57	23,901,799,352
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20,600,227,449	19,974,293,750	96,96	193,031,176	16,888,736,084	16.327.760.724	96,67	560.975.360
B	BELANJA LANGSUNG	59,221,596,158	20,083,483,164	33,91	6,306,547,977	67,209,320,165	43,868,496,172	65,27	23,340,823,992

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi secara total pada anggaran keuangan yaitu 50,16% pada tahun 2017 menjadi 71,57 pada tahun 2018. Peningkatan realisasi ini didukung oleh realisasi belanja langsung yaitu 33,91% pada tahun 2016 menjadi 65,27% pada tahun 2018. Adapun rincian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.586.394.825,00	1.429.709.144,00	90,12%	156.685.681,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	4.308.000,00	78,33%	1.192.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	267.686.000,00	259.089.266,00	96,79%	8.596.734,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	299.000.000,00	216.714.494,00	72,48%	82.285.506,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83.572.472,00	81.830.395,00	97,92%	1.742.077,00
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	39.929.810,00	79,86%	10.070.190,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.866.675,00	31.767.450,00	96,66%	1.099.225,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.998.700,00	23.453.090,00	93,82%	1.545.610,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.877.600,00	8.587.700,00	86,94%	1.289.900,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.870.000,00	33.427.600,00	88,27%	4.442.400,00
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	199.000.000,00	198.945.431,00	99,97%	54.569,00
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	428.917.252,00	414.736.456,00	96,69%	14.180.796,00
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	71.984.916,00	70.583.452,00	98,05%	1.401.464,00
13	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	75.121.210,00	46.336.000,00	61,68%	28.785.210,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.951.796.600,00	1.814.485.999,00	92,96%	137.310.601,00
1	Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00%	100.000,00

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.944.000,00	99,44%	56.000,00
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	192.280.000,00	190.074.000,00	98,85%	2.206.000,00
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	200.000.000,00	198.674.000,00	99,34%	1.326.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,00	2.502.000,00	50,04%	2.498.000,00
6	Pembangunan Hall Puskesmas Guguak Panjang	450.000.000,00	438.691.999,00	97,49%	11.308.001,00
7	Pengadaan Ambulance	980.000.000,00	964.700.000,00	98,44%	15.300.000,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.091.500,00	41.347.300,00	98,23%	744.200,00
1	Penyusunan Profil Kesehatan dan Aplikasi SIK	29.091.500,00	28.532.800,00	98,08%	558.700,00
2	Pelayanan Administrasi kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	13.000.000,00	12.814.500,00	98,57%	185.500,00
IV	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	1.079.717.215,00	966.076.170,00	80,13%	113.641.045,00
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	200.000.000,00	191.790.500,00	89,47%	8.209.500,00
2	Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	81.979.215,00	72.374.678,00	95,90%	9.604.537,00
3	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018)	749.000.000,00	677.847.992,00	88,28%	71.152.008,00
4	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018)	48.738.000,00	24.063.000,00	90,50%	24.675.000,00
V	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.810.543.872,00	8.344.836.606,03	70,66%	3.465.707.265,97
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasumah Ahmad	190.852.567,00	174.145.488,00	91,25%	16.707.079,00
2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	202.605.565,00	191.876.518,00	94,70%	10.729.047,00
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	187.496.940,00	182.279.941,00	97,22%	5.216.999,00

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	102.660.500,00	95.269.571,00	92,80%	7.390.929,00
5	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah	106.151.560,00	98.687.797,00	92,97%	7.463.763,00
6	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	169.389.210,00	161.952.249,00	95,61%	7.436.961,00
7	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	138.187.336,00	136.059.032,00	98,46%	2.128.304,00
8	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dasar dan Rujukan	253.814.700,00	240.687.792,00	94,83%	13.126.908,00
9	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana non Kapitasi)	45.000.000,00	21.037.500,00	46,75%	23.962.500,00
10	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	833.444.965,00	711.965.821,00	85,42%	121.479.144,00
11	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	1.051.736.338,00	857.895.705,00	81,57%	193.840.633,00
12	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	821.893.812,00	539.658.156,00	65,66%	282.235.656,00
13	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	876.567.349,00	667.508.361,00	76,15%	209.058.988,00
14	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	329.075.000,00	284.246.780,00	86,38%	44.828.220,00
15	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	227.310.527,00	210.743.375,00	92,71%	16.567.152,00
16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD (Dana Kapitalisasi JKN 2017)	346.623.023,00	270.208.860,03	77,95%	76.414.162,97
17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	28.707.640,00	15.989.940,00	55,70%	12.717.700,00
18	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji	18.931.840,00	16.911.750,00	89,33%	2.020.090,00

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
19	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisik BOK 2018)	809.230.000,00	639.872.730,00	79,07%	169.357.270,00
20	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik BOK 2018)	328.956.000,00	301.076.000,00	91,52%	27.880.000,00
21	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik BOK 2018)	472.363.000,00	290.791.070,00	61,56%	181.571.930,00
22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gulai Bancah (DAK Non Fisik BOK 2018)	391.000.000,00	334.692.720,00	85,60%	56.307.280,00
23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik BOK 2018)	368.000.000,00	337.872.225,00	91,81%	30.127.775,00
24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik BOK 2018)	605.704.000,00	437.564.420,00	72,24%	168.139.580,00
25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Guguk Panjang (DAK Non Fisik BOK 2018)	832.214.000,00	672.424.070,00	80,80%	159.789.930,00
26	Manajemen Pengelolaan BOK (DAK Non Fisik BOK 2018)	166.000.000,00	52.251.720,00	31,48%	113.748.280,00
27	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik BOK 2018)	1.232.867.000,00	67.482.923,00	5,47%	1.165.384.077,00
28	Upaya kesehatan Masyarakat Tingkat Kota (DAK Non Fisik BOK 2018)	673.761.000,00	333.684.092,00	49,53%	340.076.908,00
VI	Program Pengawasan Obat dan Makanan	204.812.570,00	183.328.282,00	89,51%	21.484.288,00
1	Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan dan Distribusi Sediaan Farmasi / Bahan Berbahaya di Sarana Kefarmasian	40.525.000,00	37.963.480,00	93,68%	2.561.520,00
2	Pengawasan Sanitasi Depot Air Minum	13.072.000,00	8.745.000,00	66,90%	4.327.000,00
3	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum	117.515.000,00	106.316.610,00	90,47%	11.198.390,00

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
4	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	33.700.570,00	30.303.192,00	89,92%	3.397.378,00
VII	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	572.222.900,00	482.625.272,00	84,34%	89.597.628,00
1	Pengembangan Program Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	29.078.400,00	26.766.000,00	92,05%	2.312.400,00
2	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	8.167.200,00	7.342.200,00	89,90%	825.000,00
3	Pembinaan dan Monitoring Pokjanel Posyandu dan DBD	8.166.600,00	6.326.000,00	77,46%	1.840.600,00
4	Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada	91.007.000,00	44.529.600,00	48,93%	46.477.400,00
6	Pembinaan PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat	12.336.000,00	8.302.500,00	67,30%	4.033.500,00
7	Fasilitas Kota Sehat	308.080.200,00	283.636.472,00	92,07%	24.443.728,00
8	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	115.387.500,00	105.722.500,00	91,62%	9.665.000,00
VIII	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	255.596.745,00	232.124.300,00	92,35%	23.472.445,00
1	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	111.514.500,00	91.950.100,00	82,46%	19.564.400,00
2	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	114.005.725,00	110.899.900,00	97,28%	3.105.825,00
3	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja	30.076.520,00	29.274.300,00	97,33%	802.220,00
IX	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	159.880.000,00	136.051.190,00	85,10%	23.828.810,00
1	Pengkajian Lingkungan Sehat	159.880.000,00	136.051.190,00	85,10%	23.828.810,00
X	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.142.678.245,00	775.993.268,00	0,61	366.684.977,00

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
1	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	96.064.750,00	68.409.950,00	71,21%	27.654.800,00
2	Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	42.247.550,00	36.162.810,00	85,60%	6.084.740,00
3	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	26.622.740,00	22.588.950,00	84,85%	4.033.790,00
4	Peningkatan Imunisasi	317.182.300,00	262.419.219,00	82,73%	54.763.081,00
5	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS	278.309.105,00	222.426.444,00	79,92%	55.882.661,00
6	Pengembangan IPWL	17.938.800,00	4.650.100,00	25,92%	13.288.700,00
7	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Fisik 2018)	137.000.000,00	33.674.210,00	24,58%	103.325.790,00
8	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBHCT) Tahun 2018	227.313.000,00	125.661.585,00	55,28%	101.651.415,00
XI	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	553.713.800,00	492.682.154,00	88,98%	61.031.646,00
1	Persiapan Akreditasi Puskesmas	68.450.000,00	62.025.050,00	90,61%	6.424.950,00
2	Akreditasi Laboratorium Air	21.263.800,00	17.047.300,00	80,17%	4.216.500,00
3	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018)	464.000.000,00	413.609.804,00	89,14%	50.390.196,00
XII	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.038.890.600,00	1.656.361.130,00	84,22%	382.529.470,00
1	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk Miskin	2.013.696.000,00	1.634.370.170,00	81,16%	379.325.830,00
2	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan JKN	25.194.600,00	21.990.960,00	87,28%	3.203.640,00
XIII	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas	5.137.000.000,00	916.077.639,00	0,51	4.220.922.361,00

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
	Pembantu dan Jaringannya				
1	Rehab Gedung Puskesmas, Pustu, Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	3.332.000.000,00	0,00	0,00%	3.332.000.000,00
2	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	1.805.000.000,00	916.077.639,00	50,75%	888.922.361,00
XIV	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	40.479.081.783,00	26.154.136.506,00	64,61%	14.324.945.277,00
1	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	40.479.081.783,00	26.154.136.506,00	64,61%	14.324.945.277,00
XV	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	13.700.000,00	8.061.000,00	58,84%	5.639.000,00
1	Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	13.700.000,00	8.061.000,00	58,84%	5.639.000,00
XVI	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	26.518.600,00	25.334.250,00	95,53%	1.184.350,00
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	26.518.600,00	25.334.250,00	95,53%	1.184.350,00
XVII	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	27.731.000,00	27.017.600,00	97,43%	713.400,00
1	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	27.731.000,00	27.017.600,00	97,43%	713.400,00
XVIII	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	126.949.910,00	95.050.610,00	73,61%	31.899.300,00
	Peningkatan Kesehatan Ibu	68.074.720,00	61.961.530,00	91,02%	6.113.190,00
	Peningkatan Kesehatan Anak	58.875.190,00	33.089.080,00	56,20%	25.786.110,00

NO	JENIS PROGRAM KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2018			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	KEUANGAN		
			Rp.	%	
XIX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	104.516.600,00	87.197.752,00	60,96%	17.318.848,00
1	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	84.516.600,00	82.284.152,00	97,36%	2.232.448,00
2	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	20.000.000,00	4.913.600,00	24,57%	15.086.400,00

Secara umum kegiatan-kegiatan yang terdapat di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dapat terlaksana dengan baik. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran dibawah 50 % , beberapa diantaranya adalah efisiensi anggaran dan sisa belanja kegiatan, namun ada juga adanya masalah teknis, yaitu :

No	Kegiatan	Kendala, Permasalahan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sisa anggaran dan efisiensi
2	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	Sisa anggaran karena ada efisiensi hari dan jumlah peserta
3	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018)	Anggaran SPPD dalam Kota Bukittinggi yang disediakan tidak bisa dicairkan karena dalam Perwako tidak tersedia
4	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana non Kapitasi)	Sisa anggaran dan efisiensi
5	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik BOK 2018) Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik BOK 2018)	Jumlah sasaran penerima jampersal sedikit
6	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada	Kegiatan jambore nasional SBH yg dijadwalkan pada bulan November batal diadakan di tingkat nasional
7	Upaya kesehatan Masyarakat Tingkat Kota (DAK Non Fisik BOK 2018)	Dana sisa dan efisiensi anggaran
8	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Fisik 2018)	Vaccine carrier yang diadakan berukuran kecil sehingga ada efisiensi anggaran
9	Pengembangan IPWL	Jumlah klien yang datang ke Puskesmas/IPWL sedikit
10	Rehab Gedung Puskesmas, Pustu, Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh dijadwalkan pada tahun 2019 dengan dana DAK, karena pd th.2018 tanah

		belum tersedia
11	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	Sisa dana dan efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran pada tahun 2018 dapat dilakukan sebesar Rp.583.156.810,-. Hal ini dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa kegiatan yang memiliki topic/isu yang sama dalam satu kegiatan tanpa mengurangi pencapaian tujuan serta mengakomodir kegiatan yang didanai oleh APBD ke dalam kegiatan yang bersumberdana DAK, sebagaimana tabel efisiensi anggaran berikut.

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	EFISIENSI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	583,156,810	
	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12,657,000	
	a Penyusunan laporan keuangan semesteran	4,440,000	Gabung dengan kegiatan rapat-rapat
	b Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	992,000	Gabung dengan kegiatan rapat-rapat
	c Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,725,000	Gabung dengan kegiatan rapat-rapat
	d. Penyusunan dokumen perencanaan , monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan	5,500,000	Gabung dengan kegiatan rapat-rapat
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	34,139,975	
	a Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	34,139,975	Diakomodir dalam kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat yang lain
3	Program Pengawasan Obat dan Pengawasan Makanan	174,283,835	
	a Pemeriksaan Kualitas Air	174,283,835	Diakomodir dalam kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat yang lain
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	157,170,000	
	a Promosi Program Pembangunan Kesehatan	157,170,000	Diakomodir dalam kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat yang lain
5	Program Upaya Perbaikan dan Peningkatan Gizi Masyarakat	31,835,500	
	a Monitoring dan Evaluasi, KIE, Integrasi Program Gizi	31,835,500	Diakomodir dalam kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat yang lain
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	129,311,000	
	a Pengendalian Penyakit Bersumber Dari Binatang	129,311,000	Diakomodir dalam kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat yang lain
7	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	43,759,500	
	a Penyelenggaraan Komunikasi Data	43,759,500	Diakomodir dalam kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat yang lain

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, secara umum dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2018 telah mencapai hasil sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja

1. Capaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan indikator jumlah kasus kematian ibu melahirkan, jumlah kasus kematian bayi baru lahir, prevalensi gizi kurang BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting) dan persentase keluarga sehat sudah mencapai target kinerja yang diharapkan.
2. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indicator Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

B. Efisiensi Anggaran

Beberapa kegiatan dalam dilaksanakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan yang diharapkan sebesar Rp. Rp.583.156.810,- pada tahun 2018.

C. Strategi pada tahun 2019

Beberapa strategi yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan program tahun 2019 adalah :

4. Penguatan kelembagaan dan organisasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia, pemantapan perencanaan monitoring dan evaluasi serta peningkatan manajemen pembangunan kesehatan.
5. Beberapa indikator perlu peningkatan terutama yang berhubungan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, perlu dilakukan upaya promosi yang lebih gencar lagi ke masyarakat tentang kesehatan, penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Promosi yang dilakukan menggunakan metoda dan media yang lebih efektif yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
6. Perlu peningkatan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak Lintas Sektor dan Lintas Program yang terlibat langsung dengan program kesehatan serta stakeholder dan unsur masyarakat.

7. Akreditasi dan reakreditasi puskesmas merupakan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang lebih baik dan menjadi target yang harus dicapai dimana seluruh puskesmas wajib memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar akreditasi.

Bukittinggi, Maret 2019